

Evolusi Bentuk Arsitektur Bale Banjar di Era Pariwisata: Analisis Relasi Fungsi-Spasial di Kecamatan Kuta

Ni Made Mitha Mahastuti

(Program Studi Sarjana Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana)
mitha@unud.ac.id

Nyoman Ratih Prajnyani Salain

(Program Studi Sarjana Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana)

Abstrak

Bale Banjar merupakan pusat kegiatan komunal masyarakat adat Bali yang merepresentasikan nilai Tri Hita Karana. Perkembangan pariwisata massal di Kecamatan Kuta sejak 1970-an mendorong transformasi sosial-ekonomi yang memengaruhi bentuk dan fungsi Bale Banjar. Penelitian ini bertujuan menganalisis evolusi arsitekturnya sebagai respons terhadap tekanan pariwisata serta menilai keberlanjutan identitas budaya yang dikandungnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitik dengan studi kasus multi-situs melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil menunjukkan adanya ekspansi fisik 30–50% dan pergeseran dari tipologi terbuka ke semi-tertutup/tertutup, dengan orientasi kosmologis makro tetap dipertahankan namun zona sakral menyempit. Transformasi material dan integrasi fungsi ekonomi memunculkan pola hibridisasi yang menggeser tata kelola komunal, meski awig-awig tetap diadaptasi. Secara konseptual, evolusi ini mencerminkan *adaptive resilience*, yakni negosiasi antara pelestarian nilai adat dan tuntutan ekonomi pariwisata, yang menegaskan sifat dinamis arsitektur vernakular.

Kata Kunci: Bale Banjar, evolusi arsitektur, pariwisata massal, Tri Hita Karana, *adaptive resilience*.

Abstract

Bale Banjar is the center of communal activities for the Balinese indigenous community, representing the values of Tri Hita Karana. The development of mass tourism in Kuta District since the 1970s has driven socio-economic transformations that have influenced the form and function of Bale Banjar. This study aims to analyze its architectural evolution in response to tourism pressures and assess the sustainability of its cultural identity. The method used is qualitative descriptive-analytical with a multi-site case study through observation, interviews, and document study. The results show a 30–50% physical expansion and a shift from an open to a semi-closed/enclosed typology, with the macro-cosmological orientation maintained but the sacred zone narrowed. Material transformation and integration of economic functions give rise to a hybridization pattern that shifts communal governance, although the customary rules and regulations remain adapted. Conceptually, this evolution reflects *adaptive resilience*, namely the negotiation between the preservation of customary values and the demands of the tourism economy, which emphasizes the dynamic nature of vernacular architecture.

Keywords: Bale Banjar, architectural evolution, mass tourism, Tri Hita Karana, *adaptive resilience*.

1. PENDAHULUAN

Banjar pada hakikatnya merupakan rumah kolektif bagi krama banjar, yang merepresentasikan ruang kebersamaan komunitas adat. Dalam kompleks Bale Banjar terdapat elemen-elemen pembentuk yang serupa dengan tatanan rumah tradisional Bali pada umumnya, seperti bale daja, bale delod, bale dangin, bale dauh, merajan atau tempat suci, serta *paon*/dapur (Kusuma, Agusintadewi, & Adhika, 2024). Selain struktur-struktur tersebut, Bale Banjar juga dilengkapi dengan bangunan tambahan berupa bale wantilan yang berfungsi sebagai ruang utama untuk menampung berbagai aktivitas komunal masyarakat. Sementara itu, bale kulkul menjadi elemen pelengkap yang berperan sebagai media komunikasi tradisional bagi warga banjar (Sanjaya & Juliarthana,

2019). Menurut (Suryawati, 2018), banjar dipahami sebagai ruang terbuka komunal yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan membangun relasi sosial dalam konteks kultural maupun religius. Bale Banjar bisa dipahami sebagai pusat kegiatan komunal tradisional di Bali sebagai representasi spasial dari sistem sosial, religius, dan kosmologis masyarakat adat. Dalam tatanan tradisional, Bale Banjar tidak sekadar berfungsi sebagai ruang pertemuan, melainkan sebagai “jantung banjar” yang mengintegrasikan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai harmoni Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan ke dalam konfigurasi arsitekturalnya. Secara morfologis, bangunan ini diwujudkan dalam bentuk bangunan terbuka dengan struktur sederhana namun sarat makna simbolik, mengikuti prinsip Tri Angga, Asta Kosala Kosali, serta orientasi Nawa Sanga sebagai representasi keseimbangan kosmik. Sebelum berkembangnya industri pariwisata pada 1970-an, Bale Banjar di Kuta berfungsi utama sebagai ruang musyawarah adat, *pesangkepan wargi*, pelaksanaan upacara, dan penguatan solidaritas krama banjar (Mahastuti, Salain, & Zakharia, 2025).

Namun, transformasi sosial-ekonomi yang dipicu oleh pembangunan Bandara Internasional Ngurah Rai menandai fase baru dalam dinamika spasial Kuta terutama terkait pariwisata. Secara implisit hal ini terungkap dalam pidato Presiden Soeharto saat peresmian Bandara Internasional Ngurah Rai tanggal 1 Agustus 1969. Dalam pidato itu, ia mengatakan bidang kepariwisataan diharapkan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan Pelita I (Wijaya, 2012). Ledakan kunjungan wisatawan asing sejak era 1970-an mendorong urbanisasi pesat, perubahan tata guna lahan, serta peningkatan intensitas aktivitas ekonomi berbasis pariwisata. Dalam konteks ini, Bale Banjar terkena dampak dan mengalami tekanan adaptif yang signifikan. Keterbatasan lahan dan tuntutan fungsi baru memicu perluasan bangunan hingga 30–50% dari luasan awal untuk mengakomodasi aktivitas multifungsi. Transformasi tersebut tidak hanya tercermin pada perubahan fisik, melalui penggunaan material modern seperti beton bertulang, kaca, serta pengolahan fasad kontemporer, tetapi juga pada pergeseran fungsi menjadi ruang hibrida yang melayani kegiatan ekonomi, seperti penyewaan ruang, penyelenggaraan event budaya wisata, hingga pusat informasi turis (Mahastuti, Adhika, Dwijendra, & Susanta, 2025).

Meskipun demikian, elemen-elemen sakral seperti area suci (Pura Pengulon Banjar) dan struktur simbolik tertentu tetap dipertahankan sebagai penanda identitas kultural. Fenomena ini menunjukkan negosiasi antara pelestarian nilai tradisional dan kebutuhan adaptasi ekonomi. Studi mencatat dalam hampir tiga dekade terakhir bahwa lebih dari 60% Bale Banjar di Kuta telah terintegrasi dengan aktivitas ekonomi lokal (Arjaya, 1999), menunjukkan gejala yang sejalan dengan konsep “staged authenticity” dari (MacCannell, 1976), ruang adat mengalami proses pementasan untuk konsumsi wisatawan tanpa sepenuhnya kehilangan makna internalnya bagi komunitas. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai relasi antara fungsi dan bentuk dalam arsitektur komunal Bali, terutama di Kuta sebagai daerah awal yang terdampak pariwisata. Pada satu sisi, Bale Banjar dituntut untuk adaptif terhadap dinamika pariwisata massal; di sisi lain, ia tetap menjadi simbol keberlanjutan identitas budaya berbasis Tri Hita Karana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi bentuk arsitektur Bale Banjar di Kecamatan Kuta sebagai respons terhadap tekanan pariwisata

massal, dengan menelaah bagaimana elemen arsitektur tradisional bertahan, bertransformasi, atau mengalami penurunan makna.

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana evolusi bentuk arsitektur Bale Banjar di Kecamatan Kuta mencerminkan adaptasi spasial terhadap kebutuhan pariwisata massal tanpa mengorbankan identitas budaya Bali berbasis Tri Hita Karana? Sub-masalah yang dikaji meliputi: (1) sejauh mana modifikasi material modern seperti beton dan kaca memberi pengaruh terhadap simbolisme dan hierarki spasial tradisional; (2) bagaimana integrasi fungsi ekonomi berdampak terhadap dinamika musyawarah dan praktik sosial banjar; serta (3) apakah komersialisasi ruang berimplikasi pada potensi erosi awig-awig adat sebagai landasan normatif komunitas.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, yang lazim diterapkan dalam kajian arsitektur vernakular dan ruang sosial berbasis budaya (Creswell & Poth, 2018) (Groat & Wang, 2013). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap evolusi bentuk, adaptasi spasial, serta implikasi kultural Bale Banjar dalam konteks kawasan pariwisata aktif. Analisis dilakukan melalui triangulasi data primer dan sekunder untuk meningkatkan validitas temuan (Denzin, 1978) (Yin, 2018). Penelitian ini diperdalam melalui paradigma interpretatif dengan strategi studi kasus multi-situs, yang bertujuan memahami transformasi arsitektur Bale Banjar di Kecamatan Kuta sebagai respons terhadap perkembangan pariwisata massal, sekaligus menafsirkan perubahan tersebut dalam kerangka nilai Tri Hita Karana dan sistem sosial adat Bali (Geertz, 1973) (Yin, 2018). Pendekatan interpretatif dipilih karena memungkinkan pemaknaan atas perubahan bentuk dan fungsi ruang berdasarkan perspektif aktor sosial yang terlibat.

Penelitian difokuskan pada Bale Banjar di Kecamatan Kuta yang merepresentasikan variasi tingkat intervensi modern dan integrasi fungsi ekonomi. Unit analisis mencakup: (1) elemen fisik dan morfologi bangunan; (2) tata ruang dan hierarki spasial; (3) aktivitas sosial-musyawarah; serta (4) regulasi adat (awig-awig) sebagai sistem normatif pengelolaan ruang komunal. Pemilihan kasus dilakukan secara purposive berdasarkan tingkat tekanan pariwisata, perubahan material bangunan, serta intensitas komersialisasi ruang (Yin, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, observasi arsitektural dan spasial berupa dokumentasi morfologi bangunan untuk mengidentifikasi perubahan bentuk, penggunaan material modern (beton, kaca, baja), dan pergeseran hierarki ruang dalam perspektif arsitektur tradisional Bali (Gelebet, 1986). Teknik ini digunakan untuk menjawab sub-masalah terkait dampak material modern terhadap simbolisme dan struktur ruang. Kedua, observasi partisipatif saat pelaksanaan *pesangkepan wargi* (rapat adat) untuk memahami dinamika sosial dan perubahan praktik musyawarah dalam konteks integrasi fungsi ekonomi (Spradley, 1980). Ketiga, wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan guna mengeksplorasi persepsi informan terhadap transformasi bentuk arsitektur dan kemungkinan penyesuaian terhadap awig-awig sebagai respons atas komersialisasi ruang (Creswell & Poth, 2018). Keempat, studi dokumen terhadap awig-awig, *pararem*, dan arsip historis dilakukan untuk menguatkan analisis normatif dan historis.

Analisis data dilakukan melalui tiga lapis pendekatan. Pertama, analisis morfologi spasial untuk mengidentifikasi evolusi bentuk dan perubahan hierarki ruang dalam kerangka arsitektur Bali tradisional (Gelebet, 1986). Kedua, analisis tematik-naratif untuk mengonstruksi makna perubahan berdasarkan narasi informan (Riessman, 2008). Ketiga, analisis relasional berbasis Tri Hita Karana untuk menilai apakah transformasi spasial masih menjaga keseimbangan Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan atau menunjukkan indikasi perubahan nilai adat. Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi antara observasi, wawancara, dan dokumen (Denzin, 1978).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sisi evolusi morfologi Bale Banjar di Kecamatan Kuta dilihat kembali perubahan bentuk dan ekspansi spasial yang terjadi. Hasil observasi menunjukkan bahwa Bale Banjar mengalami ekspansi fisik antara 30-50% dari luasan awal. Perubahan ini terutama terjadi pada: penambahan ruang tertutup permanen, pelebaran *wantilan*, integrasi ruang komersial di sisi depan atau samping tapak, dan peningkatan ketinggian bangunan. Dalam kerangka morfologi arsitektur Bali tradisional, perubahan ini menunjukkan pergeseran dari tipologi bale terbuka (*open pavilion typology*) menuju bentuk semi-tertutup atau tertutup penuh. Menurut (Gelebet, 1986) Bale Banjar dalam arsitektur Bali memiliki karakter struktur ringan, hierarki ruang terbuka, dan orientasi kosmologis berbasis Nawa Sanga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa orientasi kosmologis masih dipertahankan secara makro (arah *kaja-kelod*), namun secara mikro terjadi penyempitan zona sakral dan penurunan keterbacaan Tri Angga (*utama-madya-nista*). Fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk *morphological adaptation under economic pressure*, di mana bentuk mengikuti tuntutan fungsi baru (Groat & Wang, 2013).



Gambar 1. Bale Banjar yang mengalami perubahan tipologi ruang (terbuka-tertutup), zona horizontal menjadi vertikal.

Selanjutnya jika dilihat dari transformasi material dan perubahan simbolisme terjadi penggantian/perubahan material tradisional seperti: kayu, batu bata merah, atap ijuk/genteng tradisional ke beton bertulang, baja ringan, kaca, dan keramik modern. Menurut (Frampton, 1983) dalam konsep *Critical Regionalism*, modernisasi material dapat menjadi strategi adaptif selama tetap menjaga resistensi terhadap homogenisasi global. Pada kasus Bale Banjar di Kuta ditemukan dua pola. Pola pertama adalah *Hybrid Preservation* ketika material modern digunakan tetapi bentuk tradisional dipertahankan (ornamen, atap limasan Bali). Pola kedua adalah *Functional Modernization*, ketika bentuk dan material berubah secara signifikan demi efisiensi ekonomi dan kapasitas ruang. Secara simbolik, beton dan kaca memiliki implikasi terhadap memudarnya tampilan visual

tradisional, berkurangnya sifat komunal ruang terbuka, dan perubahan makna Bale Banjar sebagai ruang yang memiliki sifat egaliter (sederajat). Material bukan sekadar teknis, tetapi membawa nilai simbolik (Rapoport, 1969). Dalam konteks ini, material modern memperkenalkan logika efisiensi dan komersialisasi.



Gambar 2. Bale Banjar dengan material modern

Kemudian pada sisi yang berbeda, dilihat integrasi fungsi ekonomi dan dinamika sosial banjar yang menitikberatkan pada penggunaan ruang serbaguna (dari sakral-komunal ke komunal-komoditas). Temuan observasi partisipatif menunjukkan bahwa ruangan dalam Bale Banjar digunakan untuk fungsi komersial, *event* pariwisata, disewakan untuk kegiatan di luar warga adat, dan bisa juga menjadi pusat distribusi informasi wisata. Hal ini sejalan dengan konsep “staged authenticity” (MacCannell, 1976), ketika ruang budaya dipresentasikan untuk konsumsi wisatawan tanpa sepenuhnya kehilangan makna internal. Tetapi pada sisi yang berbeda, terjadi perubahan pada praktik *pesangkepan wargi*. Ada masa ketika intensitas musyawarah menurun, pengaturan waktu menyesuaikan agenda komersial, dan ruang rapat terkadang berpindah ke ruang lebih kecil. Secara sosial ini menunjukkan pergeseran dari *communal-centered governance* ke arah *revenue-supported governance*. Menurut (Lefebvre, 1991), ruang adalah produk sosial. Dalam kasus ini, ruang banjar kini diproduksi ulang melalui logika ekonomi pariwisata.



Gambar 3. Bale Banjar yang penggunaan ruangnya berbagi dengan fungsi komersial

Dari sisi aturan adat (*awig-awig* ataupun *pararem*) ditemukan adaptasi normatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa *awig-awig* tidak dihapus namun muncul aturan

tambahan terkait pengelolaan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa yang berubah bukan fondasi normatif, tetapi mekanisme implementasinya. Dalam perspektif (Geertz, 1973), budaya bersifat interpretatif dan adaptif. Bale Banjar di Kuta menunjukkan bentuk *cultural negotiation*. Namun terdapat pula indikasi ruang sakral yang semakin terfragmentasi dan batas sakral-profan yang menjadi lebih cair. Hal ini menunjukkan pergeseran dari sistem kosmologis murni menuju sistem pragmatis-ekonomi. Kemudian jika dilihat dari evaluasi relasional berbasis Tri Hita Karana dan bagian ini menjadi inti pembahasan konseptual. Pada area Parahyangan, area suci seperti Pura Pengulun Banjar tetap dipertahankan, namun proporsi ruang sakral mengecil dan akses publik meningkat. Artinya fungsi simbolik bertahan, tetapi dominasi spasial menurun. Pada bagian Pawongan, dimensi sosial mengalami transformasi paling signifikan. Interaksi tetap ada, tetapi kini beririsan dengan aktivitas ekonomi. Terjadi pergeseran dari solidaritas berbasis adat menuju solidaritas berbasis pengelolaan ekonomi kolektif. Pada bagian Palemahan, ekspansi fisik menunjukkan tekanan pada relasi manusia dan lingkungan. Material modern meningkatkan ketahanan struktur tetapi menurunkan ekspresi ekologis tradisional.

Pada akhirnya evolusi Bale Banjar di Kuta berdasarkan temuan bisa dirumuskan menjadi tiga fase evolusi: (1) Fase Tradisional (Pra-1970), Bale Banjar sebagai pusat musyawarah adat dan ritual, (2) Fase Adaptasi Awal (1970–1990), mulai integrasi ekonomi lokal dan perubahan material awal, dan (3) Fase Hibridisasi Intensif (1990-sekarang) ketika Bale Banjar lebih banyak digunakan sebagai ruang komunal-ekonomi serbaguna. Evolusi ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan penurunan kualitas secara total, melainkan arsitektur negosiasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi Bale Banjar di Kecamatan Kuta bukan sekadar perubahan fisik, melainkan transformasi relasional antara ruang, nilai adat, ekonomi pariwisata, dan identitas komunal. Transformasi tersebut memperlihatkan pola *adaptive resilience*, di mana identitas budaya tidak hilang, tetapi dinegosiasikan dalam kerangka ekonomi global. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa arsitektur vernakular bukan sistem statis, melainkan sistem dinamis yang mampu bertransformasi tanpa sepenuhnya melepaskan struktur nilai dasarnya (Rapoport, 1969) (Frampton, 1983) dan (Lefebvre, 1991).



Gambar 4. Evolusi Bale Banjar di Kuta dari 1970an-sekarang

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis morfologi, transformasi material, dinamika sosial, serta evaluasi relasional berbasis Tri Hita Karana, dapat disimpulkan bahwa evolusi Bale

Banjar di Kecamatan Kuta merupakan proses adaptasi spasial yang bersifat negosiatif dan resilien, bukan bentuk degradasi total terhadap identitas arsitektur tradisional Bali. Secara morfologis, terjadi ekspansi fisik sebesar 30–50% dari luasan awal dengan pergeseran dari tipologi bale terbuka menuju bentuk semi-tertutup atau tertutup; orientasi kosmologis makro seperti *kaja-kelod* dan prinsip Nawa Sanga relatif tetap dipertahankan, namun secara mikro tampak penyempitan zona sakral dan menurunnya keterbacaan hierarki Tri Angga, menunjukkan adanya *morphological adaptation under economic pressure*. Pada aspek materialitas, peralihan dari kayu, bata merah, dan ijuk ke beton bertulang, kaca, serta baja ringan menghadirkan pola *hybrid preservation* dan *functional modernization*, ketika material modern tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kapasitas ruang, tetapi juga merekonstruksi makna simbolik serta mengurangi ekspresi komunal ruang terbuka. Integrasi fungsi ekonomi turut mentransformasi dimensi Pawongan, menjadikan Bale Banjar sebagai ruang komunal-ekonomi serbaguna dengan pergeseran dari *communal-centered governance* menuju *revenue-supported governance*, meskipun praktik musyawarah dan solidaritas adat tetap berlangsung dalam bentuk yang diredefinisi. Dari sisi normatif, *awig-awig* tidak dihapus melainkan diadaptasi melalui penambahan aturan pengelolaan ekonomi, mencerminkan *cultural negotiation* dalam sistem budaya yang interpretatif dan adaptif. Dalam kerangka Tri Hita Karana, Parahyangan tetap bertahan secara simbolik meski dominasi spasialnya menurun, Pawongan mengalami transformasi paling signifikan akibat integrasi ekonomi, dan Palemahan menghadapi tekanan ekologis dari ekspansi serta material modern yang sekaligus meningkatkan durabilitas bangunan. Secara historis, evolusi ini dapat dipetakan dalam tiga fase; Fase Tradisional (Pra-1970), Fase Adaptasi Awal (1970-1990), dan Fase Hibridisasi Intensif (1990-sekarang), yang secara keseluruhan menunjukkan *pola adaptive resilience*, Bale Banjar tidak kehilangan identitasnya, melainkan terus menegosiasikan relasi antara ruang, nilai adat, dan ekonomi pariwisata, menegaskan bahwa arsitektur vernakular bersifat dinamis dan kontekstual, bukan sistem statis yang terjebak dalam romantisme tradisi.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diajukan mencakup aspek teoretis, praktis, kelembagaan, dan sosial-budaya secara terintegrasi. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan relasional dalam membaca transformasi arsitektur vernakular; ke depan, kajian Bale Banjar dapat diperdalam melalui pendekatan kuantitatif-spasial seperti analisis sintaksis ruang maupun pendekatan ekologi arsitektur untuk mengukur dampak lingkungan dari penggunaan material modern, serta diperluas melalui studi komparatif antar-kecamatan di Bali guna memahami variasi respons terhadap tekanan pariwisata. Secara praktis-arsitektural, proses renovasi dan pengembangan Bale Banjar di kawasan pariwisata perlu didasarkan pada pedoman desain yang lebih operasional berbasis prinsip Tri Hita Karana, dengan tetap mempertimbangkan ekspresi simbolik, hierarki spasial tradisional, dan keberlanjutan ekologis; dalam konteks ini, kerangka *critical regionalism* dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan identitas lokal. Dari sisi kelembagaan dan kebijakan, pemerintah daerah bersama desa adat perlu menyusun regulasi turunan atau panduan teknis terkait komersialisasi Bale Banjar agar integrasi fungsi ekonomi tidak mengurangi dominasi ruang sakral dan fungsi musyawarah, sekaligus menguatkan *awig-awig* melalui *pararem* yang adaptif namun tegas guna menjaga batas sakral-profan tetap terbaca secara spasial maupun sosial. Adapun secara sosial-budaya, *krama* banjar perlu terus meneguhkan kesadaran kolektif bahwa fungsi ekonomi merupakan instrumen pendukung, bukan tujuan utama eksistensi Bale Banjar, sehingga pengelolaan ruang

tetap menempatkan kegiatan adat dan musyawarah sebagai prioritas utama baik secara temporal, spasial, maupun simbolik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arjaya, I. M. (1999). *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pola Ruang Bale Banjar. Studi Kasus: Desa Adat Kuta dan Desa Adat Ubud*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A theoretical Introduction To Sociological Methods*. New York: McGraw Hill.
- Frampton, K. (1983). *Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance*. In H. Foster (Ed.), *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture*. Seattle: Bay Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books Inc.
- Gelebet, I. N. (1986). *Arsitektur Tradisional Daerah Bali*. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Groat, L. N., & Wang, D. (2013). *Architectural Research Methods (2nd ed.)*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Kusuma, I. B., Agusintadewi, N. K., & Adhika, I. M. (2024). Pemanfaatan Fasilitas Bale Banjar dalam Keberlanjutan Sosial di Desa Bali Aga Bayung Gede. *Nalars*, XXIII(2), 85-94.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Oxford: Basil Blackwood Ltd.
- MacCannell, D. (1976). *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class* (1st ed.). New York: Schoken.
- Mahastuti, N. M., Adhika, I. M., Dwijendra, N. K., & Susanta, I. N. (2025). The Analysis of Bale Banjar Shifted Function: Socio-Cultural and Economy Implications in Kuta, Bali. *Aston Jadro*, 290-296.
- Mahastuti, N. M., Salain, N. R., & Zakharia, N. M. (2025). Bale Banjar as a Space for Deliberation and the Preservation of Balinese Culture in Kuta. *Architectural Research Journal*, 85-89.
- Rapoport, A. (1969). *House Form and Culture*. Englewood Cliffs: N.J.:Prentice Hall.
- Riessman, C. K. (2008). *Narrative Methods for the Human Sciences*. Los Angeles: Sage.
- Sanjaya, A. A., & Juliarthana, I. N. (2019). PEMANFAATAN BALE BANJAR SEBAGAI RUANG KREATIVITAS ANAK MUDA DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SPACE*, I(1), 26-32.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Obsevation*. Florida: Holt, Rinehart and Winston.
- Suryawati, P. (2018). Reaktualisasi Fungsi Bale Banjar di Kota Denpasar. *Dharmasmrti*, XVIII(1), 62-70.
- Wijaya, I. N. (2012). Relasi-relasi Kekuasaan di Balik Pengelolaan Industri Pariwisata Bali. *HUMANIORA*, 141-155.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods (Sixth Editions)*. Singapore: SAGE Publications, Inc.